

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN NILAI
PROPHETIC PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KLATEN**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM. 49402200015

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN NILAI
PROPHETIC PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KLATEN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun Oleh

Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM. 49402200015

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM 49402200015

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN NILAI *PROPHETIC*
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 17 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM. 49402200015

Halaman Pengesahan Tugas Akhir (sebelum ujian)

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM 49402200015

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengelolaan Keuangan Negara Dengan Nilai *Prophetic* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Semarang, 17 Desember 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Imam Setijawan, SE., M.Sc, Akt

NIK. 2111403016

UNISOLA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

Halaman Pengesahan Tugas Akhir (setelah ujian)

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muthi'ah Anggi Wiyanti

NIM 49402200015

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengelolaan Keuangan Negara Dengan Nilai *Prophetic* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlakukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 02 Januari 2025

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Penguji 1,

Dosen Penguji 2,

Dosen Pembimbing,


Pn Rohayati Jusoh


Pn Yusliena Yusof

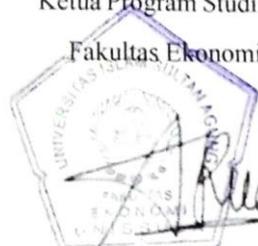

Imam Setijawan, SE, M.Sc, Akt

NIK. 2111403016

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak

NIK. 2111415028

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, hidayah, dan ridho-Nya hingga dapat diselesaikannya Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Negara Dengan Nilai *Prophetic* Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, Program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Imam Setijawan., SE., M.Sc. Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan semangat kepada penulis dalam Menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh pimpinan, Pegawai dan staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten serta Penanggung Jawab magang yang telah banyak membantu, memberikan informasi dan pengarahan bagi Penulis.
7. Pegawai Bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten selaku pendamping magang yang telah banyak membantu dan sabar membimbing penulis saat kegiatan magang tahun 2024.
8. Ibu Wagiyem dan Bapak Sriyanto sebagai orang tua penulis yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil.
9. Adik, Kakak, dan semua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap waktu.
10. Kepada Seluruh Keluarga Besar Penulis yang sentiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi serta dukungan moril maupun materil
11. Teman-teman D-III Akuntansi Angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.

12. Staff dan Karyawan Karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.

Semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi dan informasi bagi para akademisi maupun praktisi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan dengan Nilai *Prophetic* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan lebih lanjut, Harapan penulis, bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Demikian penyusunan Tugas Akhir ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik yang telah diberikan, Aamiin Allahuma Aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah

Semarang, 16 Desember 2024

Penulis,



Muthi'ah Anggi Wiyanti
NIM. 49402200015

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul "Pengelolaan Keuangan Negara dengan Nilai Prophetic Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten," bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana proses pengelolaan keuangan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dan perspektif pengelola mengenai implementasi nilai prophetic, yang meliputi Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh, dalam praktik pengelolaan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif serta pendekatan fenomenologis dan teologis, penelitian ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kantor tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dengan penerapan nilai prophetic tercermin dalam budaya kerja yang terinternalisasi melalui slogan "MAJeNg SUMRINgAH" yang mencerminkan nilai-nilai moderat, akuntabel, jernih, serta harmonis. Temuan ini juga menegaskan bahwa kesadaran akan pentingnya nilai-nilai prophetic telah menciptakan perubahan positif dalam pelayanan publik, menjadikan pengelola keuangan lebih responsif terhadap kebutuhan fasilitas kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan kinerja pengelola keuangan di sektor publik dan swasta, serta menjadi acuan bagi pengembangan praktik keuangan yang lebih berintegritas dan profesional.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuanagan, Nilai Prophetic

ABSTRACT

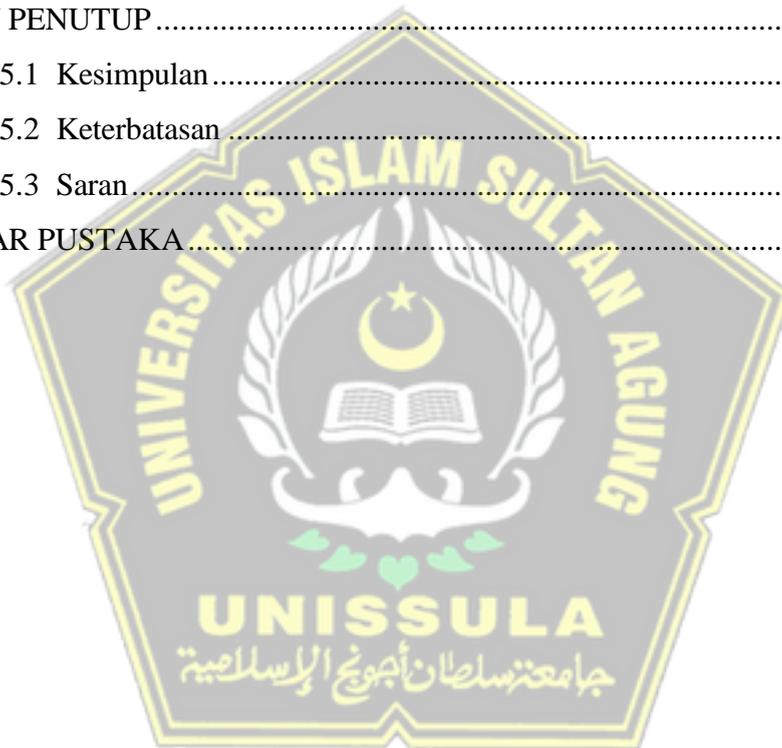
This study raises the theme "Public Finance Management with Prophetic Values at the Ministry of Religious Affairs Office of Klaten Regency," aiming to delve deeply into how the financial management process is carried out at the Ministry of Religious Affairs Office in Klaten Regency and the managers' perspectives on the implementation of prophetic values, including Shiddiq, Amanah, Fathanah, and Tabligh, in financial management practices. Using a qualitative approach with an interpretive paradigm, as well as phenomenological and theological approaches, this research emphasizes the importance of ethical values in public financial management. The research findings show that financial management at the office is carried out according to the applicable procedures, with the application of prophetic values reflected in the internalized work culture through the slogan "MAJeNg SUMRINgAH," which embodies values of moderation, accountability, clarity, and harmony. This finding also affirms that the awareness of the importance of prophetic values has created positive changes in public service, making financial managers more responsive to the needs of workplace facilities. This study is expected to contribute thoughts for improving the performance of financial managers in the public and private sectors and serve as a reference for the development of financial practices that are more integral and professional.

Keywords: Financial Management, Prophetic Values

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian <i>Stewardship Theory</i>	6
2.2 Pengertian Nilai <i>Prophetic</i>	8
2.3 Prosedur Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama	11
2.4 Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	13
2.4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabaupaten Klaten.....	14
2.4.2 Penerapan Pengelolaan Keuangan berdasarkan pada Nilai <i>Prophetic</i> pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian.....	21
3.1.1 Jenis Penelitian	21
3.1.2 Lokasi Penelitian	22
3.2 Objek Penelitian	22
3.3 Sumber Data	23

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.5 Metode Analisis Data.....	28
3.6 Informan Penelitian.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pengelolaan Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	31
4.2 Implementasi Nilai <i>Prophetic</i> dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	46
4.3 Mapping/Matriks Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Masing-Masing Program.....	43
Tabel 4. 2. Matriks Hasil Penelitian	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	15
Gambar 2. 2. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 3. 1. Informan yang terlibat dalam penelitian.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah dasar utama dan manifestasi nyata dari eksistensi birokrasi negara. Sikap dan tindakan pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mencerminkan wajah birokrasi. Menyulap orientasi pelayanan kearah yang lebih fokus pada kebutuhan pelanggan atau masyarakat adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh Pegawai pemerintah, serta dapat tercermin melalui sikap dan tindakan mereka dalam melayani umat. Demikianlah harapan dalam pelayanan *public*, yang mana tujuannya adalah mencapai kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, baik sebagai pemberi maupun pemakai secara bersamaan. (Marzuki, 2020)

Perilaku negatif para tokoh politik, penegak hukum, dan pemimpin negara terus mencuri perhatian publik, termasuk insiden-insiden kecurangan yang melibatkan Kantor Kementerian Agama. Meskipun semboyan "Ikhlas Beramal" menekankan niat tulus dalam melayani negara, ironi muncul dengan maraknya kasus penyalahgunaan anggaran, rapat fiktif, hingga jual beli jabatan yang merusak citra Kementerian Agama. Kecurangan yang berakar dalam manipulasi keuangan dan kolaborasi pihak tidak bertanggung jawab memperburuk situasi, memanfaatkan sistem untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. Sebuah pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersinergi seharusnya menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam setiap langkahnya (Kemenag, 2021).

Kementerian Agama seharusnya menjadi contoh kebersihan dan integritas dan integritas bagi Kementerian lain, namun saat ini sedang sedang tercoreng oleh beberapa kasus yang melibatkan pejabat-pejabat di dalamnya. Berbagai fraud yang kompleks semakin sulit diatasi karena integritas individu yang rendah, kurangnya pengendalian internal, serta kurangnya pengendalian internal, serta kurang optimalnya kerjasama antar institusi pengelola risiko korupsi di indonesia (<https://www.detik.com>)

Berdasarkan hasil observasi peneliti Pegawai aktif di kantor hanya dari pukul 07.30-12.00 setelah itu sampai pukul 16.00 ada Sebagian Pegawai sudah ada yang pulang terlebih dahulu padahal jam kerja kantor belum selesai, jadi sebaiknya kedisiplinan diperbaiki karena sudah menjadi peraturan bagi kantor tersebut. Menurut peneliti dengan begitu tidak menerapkan nilai *prophetic* “amanah”.

Berdasarkan landasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun Kantor Kementerian Agama memiliki kaitan dengan nilai keagamaan, citra negatif pemerintah tetap melekat, membuka peluang terjadinya kecurangan. Inilah yang mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kesadaran tertinggi dalam pengabdian, dengan menekankan misi kenabian yang melampaui sekadar nilai mental. Peningkatan integritas pribadi dan penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama memerlukan lebih dari sekadar evaluasi kinerja; ia menuntut pembentukan pemahaman yang berlandaskan pada prinsip spiritual, mengingat bahwa sebagian besar aktivitas di bidang ini terkait erat dengan aspek keimanan dan ketaatan beragama.

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena yang melibatkan pengelolaan keuangan negara, dengan penekanan pada nilai-nilai prophetic yang berakar pada ajaran agama, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dengan tepat dan transparan, munculnya gagasan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip prophetic dalam pengelolaan tersebut dapat memberikan perspektif yang berbeda, terutama dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta akuntabilitas fiskal yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan efektivitas semata, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama yang menjadi landasan etika dalam menjalankan amanah publik. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada angka-angka kering dalam laporan keuangan, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih luas, yang mencakup pemberdayaan umat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai prophetic dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dengan harapan bahwa kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyusunan kebijakan yang lebih humanis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama, sekaligus menjadi jembatan untuk menghubungkan antara teori-teori pengelolaan keuangan yang konvensional dengan praktik nyata yang lebih berpihak pada kesejahteraan umat, yang tentunya harus dipahami dalam konteks lokal yang memiliki

karakteristik dan kebutuhan yang unik. Maka judul penelitian ini yakni:
***“Pengelolaan Keuangan Negara dengan Nilai Prophetic Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Klaten”***

1.2 Rumusan Masalah

Peran prophetic dalam masyarakat kontemporer saat ini sangatlah fundamental sebagai upaya untuk membebaskan diri dari belenggu materialisme yang semakin menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks global yang dipenuhi oleh dorongan untuk mengejar keuntungan material semata, nilai-nilai prophetic menawarkan sebuah paradigma alternatif yang menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan rohaniyah, dengan menjadikan prinsip-prinsip moral, spiritual, dan sosial sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan hidup. Di tengah hiruk-pikuk konsumsi yang semakin mendominasi, peran prophetic berfungsi sebagai penyulut kesadaran kolektif yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya memperjuangkan kemaslahatan bersama, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan dalam harmoni dengan alam. Dalam masyarakat yang sering terjebak dalam pelarian menuju kekayaan materi, nilai prophetic menawarkan pembebasan yang lebih hakiki, mengarahkan individu dan komunitas untuk tidak hanya berpikir tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang makna hidup yang lebih mendalam yang bisa menyentuh sisi kemanusiaan, kebaikan, dan rasa tanggung jawab sosial, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana implementasi nilai *prophetic* dalam pengelolaan keuangan di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Untuk menganalisis implementasi nilai *prophetic* dalam laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam aspek praktis maupun konseptual, dengan menawarkan masukan yang mendalam dan pertimbangan strategis bagi para pihak yang berkepentingan dalam menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan yang optimal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan alokasi dana yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, penelitian ini diharapkan untuk membuka wawasan baru mengenai bagaimana sistem pengendalian yang diterapkan dapat berfungsi sebagai pondasi yang kokoh dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan memanfaatkan metodologi yang komprehensif, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang ada, tetapi juga memberikan peta jalan bagi pengambil kebijakan dan pengelola keuangan untuk melakukan perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang sistematis, penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perbaikan

berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih handal, sehingga akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klaten yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap teori yang telah ada sebelumnya, yang menegaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten senantiasa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK) yang berlaku dalam setiap tahap penyusunan laporan keuangan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip akuntansi yang terstruktur dan terstandarisasi, penelitian ini berusaha menelusuri sejauh mana implementasi SAK diterjemahkan dalam praktik pengelolaan keuangan di tingkat instansi pemerintahan, khususnya di Kantor Kementerian Agama. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperjelas bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan bukti konkret mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang berbasis pada standar yang telah diakui secara nasional, serta memperkuat fondasi teoretis yang mendasari perlunya regulasi yang jelas dan sistematis dalam mencapai tata kelola yang baik di lingkungan kementerian, agar dapat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal dan berdaya guna dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Stewardship Theory*

Teori Stewardship yang diperkenalkan oleh Lex Donaldson dan James H. Davis pada tahun 1989 menggambarkan paradigma pengelolaan yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada ambisi pribadi, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengelola untuk mengabdikan diri sepenuhnya dalam pencapaian tujuan bersama tanpa terdoda oleh dorongan individualistik yang sering kali mengarah pada kepentingan diri sendiri. Melalui pendekatan ini, stewardship mengasumsikan bahwa pengelola, dengan dasar psikologis yang mendalam dan landasan sosiologis yang kuat, akan berfokus pada hasil yang lebih besar yang memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pentingnya rasa tanggung jawab yang dalam, dimana pengelola bertindak sebagai pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga aset organisasi, tetapi juga untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan prinsip kepercayaan dan komitmen terhadap nilai-nilai etis yang lebih besar. Dalam praktek, stewardship berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai tingkat pengelolaan yang lebih baik, dengan membentuk budaya pelayanan yang tidak hanya menekankan pada hasil jangka pendek, tetapi lebih pada pencapaian yang berkelanjutan dan penuh arti dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadikan teori ini sangat relevan dalam

konteks organisasi yang mengutamakan pengelolaan yang bertanggung jawab, transparan, dan orientasi pada kesejahteraan kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan individual yang sifatnya sementara.

Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara stewards dan prinsipal, menyediakan informasi yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam tata kelola publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja menjadi vital, dimana teori Stewardship memberi fondasi bagi pemerintah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Hal ini menjaga agar tata kelola pemerintahan tetap terjaga dari praktik yang tidak jelas, dan tetap berfokus pada pencapaian hasil yang optimal untuk masyarakat luas.

Dampak utama teori Stewardship terlihat dalam peran Kementerian Agama, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah, sebagai penanggung jawab, memimpin dan mengarahkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip kenabian, pemerintah diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas, mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan bersama (Rodríguez, Velastequí, 2019).

2.2 Pengertian Nilai *Prophetic*

Kata "prophetic" asalnya bahasa Inggris "prophet," punyai kaitan erat dengan para nabi atau rasul, simbol dari nilai-nilai luhur yang diterapkan dalam kehidupan, terutama pada Nabi Muhammad S.A.W, yang bukan hanya dianggap sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai teladan agung umat manusia, memegang posisi tak tergoyahkan sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia (Maulana, 2024). Dalam konteks Kantor Kemenag Kabupaten Klaten, nilai prophetic yang terwujud melalui sifat-sifat mulia seperti shiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh bukan hanya dihadirkan sebagai elemen normatif belaka, melainkan menjadi pilar yang mendasar untuk membangun lingkungan kerja yang penuh integritas dan produktivitas. Sifat shiddiq, yang mengutamakan kejujuran dan kebenaran, tidak hanya mengarah pada pengelolaan yang transparan, tetapi juga menjadi pendorong efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam setiap lini pekerjaan. Kepercayaan, atau amanah, menyatu dengan karakter yang penuh tanggung jawab, menjadi landasan untuk menciptakan hubungan profesional yang dapat dipercaya, menghilangkan segala potensi penyimpangan yang merusak harmoni organisasi. Sementara itu, fathannah menuntut kecerdasan yang mendalam serta kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh. Keempat nilai prophetic ini, jika diterapkan secara konsisten, tidak hanya membentuk pengelolaan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat pondasi moral dan etika didalam tubuh organisasi, menciptakan budaya kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan komunikasi yang efektif.

Selain itu, sifat tabligh yang komunikatif dan transparan memegang peran yang sangat sentral dalam menciptakan sebuah jalur komunikasi organisasi yang efektif di dalam lembaga pemerintah, khususnya di Kementerian Agama, dengan tetap berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip komunikasi yang melibatkan aspek penjualan, pemasaran, dan pembentukan opini publik menjadi sangat penting untuk diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan integritas, memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak hanya sampai dengan jelas kepada audiens, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang luhur dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin (2021), penerapan nilai-nilai prophetic dalam praktik komunikasi organisasi ini membawa dampak yang signifikan, yaitu terbentuknya budaya kerja yang lebih transparan, efisien, dan penuh tanggung jawab, di mana setiap individu dan unit kerja di dalam organisasi tersebut tidak hanya bekerja demi pencapaian tujuan administratif dan finansial, tetapi juga menjalankan tugasnya dengan kesadaran penuh akan dampak sosial, moral, dan etika dari setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, nilai prophetic tidak hanya memperkaya cara berkomunikasi, tetapi juga menuntun pada penciptaan budaya kerja yang mampu memperkuat fondasi transparansi dan keadilan dalam setiap proses yang berlangsung, mendorong lembaga untuk terus berkembang dengan memprioritaskan integritas, kualitas, dan kemaslahatan bersama.

1. Keshiddiqan adalah ketulusan dalam kata, sikap, atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan. Shiddiq dikenal sebagai orang yang jujur. Kualitas yang dimiliki oleh shiddiq adalah ketulusan dan tekad yang teguh dalam berperilaku, perkataan, dan tindakan saat menjalankan tugasnya. (Musyirifin, 2020)

2. Inti dari Amanah terletak pada kepercayaan, sementara dalam tata kelola pemerintahan terdapat nilai-nilai seperti kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan waktu. Saling terkait erat antara kejujuran dan amanah, karena seseorang yang berbuat jujur pastinya dapat dipercaya. (Amiruddin, 2021)

3. Fathannah memiliki pengetahuan yang luas, cerdas, memahami segala hal dengan baik serta mampu menjelaskannya dengan lancar.

Kecerdasan yang dimaksud tak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan spiritual. (*Fathanah.Pdf.Crdownload*, n.d.)

4. Makna dari Tabligh ialah bersifat komunikatif dan argumentatif. Pada hakikatnya, Tabligh memiliki karakter komunikatif dan bersifat fleksibel dalam nilai-nilai bisnisnya. Menyampaikan pesan dengan kata-kata yang baik adalah cara yang efektif untuk memengaruhi orang lain, menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. (Muhammad Abdurrauf Nasrullah & Khusnul Khotimah, 2023)

Perkembangan industri yang begitu pesat dan canggih di era globalisasi ini menunjukkan betapa dinamisnya perubahan yang terjadi di setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang industri, perdagangan, maupun jasa. Dalam menghadapi arus perubahan yang begitu cepat, setiap perusahaan, tanpa terkecuali, harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah. SDM yang efektif, efisien, dan produktif menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi dapat tercapai dengan lancar, bahkan melebihi ekspektasi. Hal ini mengharuskan setiap individu yang terlibat dalam organisasi untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi

juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi, sehingga mereka dapat bekerja dalam tim dengan harmonis, menghadapi tantangan dengan ketangguhan, dan menciptakan inovasi yang membawa perusahaan menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam dunia yang penuh dengan kompetisi ini, hanya perusahaan yang mampu membangun dan mengelola SDM secara optimal yang dapat bertahan dan berkembang, menjadikan SDM sebagai aset yang lebih bernilai daripada sekadar alat produksi semata, tetapi sebagai kekuatan utama yang mendorong tercapainya visi dan misi organisasi.

Salah satu faktor krusial dalam menentukan kesuksesan suatu Kantor atau Perusahaan adalah kepemimpinan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memberikan inspirasi, bimbingan, dan pengajaran kepada anggota tim. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menginspirasi pegawainya dalam menerapkan dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dengan memperkuat dimensi spiritual bagi kebaikan bersama. Dengan membangun kesadaran spiritual, pemimpin dapat membangkitkan semangat dan kekuatan mental Pegawai dalam mengadaptasi keyakinan, ideologi, pedoman, iman, serta etika yang tidak hanya memengaruhi perilaku mereka, namun juga meningkatkan kualitas kerja di Perusahaan atau Kantor.

Sebenarnya, tidak semua pemimpin di Perusahaan atau Kantor mampu memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada karyawan, baik dalam bentuk materi maupun tidak materi. Beberapa Perusahaan hanya menitikberatkan pada pemberian kesejahteraan berupa bonus atau upah yang tinggi.

Oleh karena itu, sepatutnya para pemimpin di Perusahaan atau Kantor dapat mengakui kebutuhan akan kepemimpinan spiritual yang mampu memengaruhi kinerja para pegawainya. (Arifuddin, 2019)

2.3 Prosedur Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama

Prosedur penyusunan Lapkeu Kantor Kemenag Tahun 2022 yang telah diaudit ini, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik, telah dirancang dan disajikan dengan mematuhi secara ketat Pedoman Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jadi acuan utama disistem pelaporan, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam setiap lini operasional yang ada dalam lingkungan Pemerintahan. Dengan berpegang pada standar yang ditetapkan oleh regulasi ini, laporan keuangan yang dihasilkan bukan hanya menjadi dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan secara objektif, tetapi juga memastikan bahwa setiap aliran dana yang tercatat mencerminkan integritas dan efisiensi dalam penggunaannya, memitigasi risiko penyimpangan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, kantor ini tidak hanya berfokus pada penyajian data keuangan semata, tetapi juga

menekankan pada transparansi yang memungkinkan pihak terkait untuk menilai kinerja keuangan secara menyeluruh, sebagai langkah menuju terciptanya tata kelola pemerintah bersih. Proses audit dilakukan menambah dimensi kredibilitas, memberikan kepastian bahwa laporan yang disajikan bebas dari kesalahan material dan telah mencerminkan realitas keuangan yang sesungguhnya, sesuai dengan pedoman yang berlaku dan memenuhi standar etika serta tata kelola keuangan yang optimal dalam rangka menjaga amanah yang telah diberikan kepada lembaga ini.

Laporan Keuangan mencakup:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan ini membandingkan anggaran yang direncanakan dengan hasil aktual, mencakup pendapatan serta belanja selama periode hingga 31 Desember, memberikan gambaran sejauh mana anggaran tercapai.

2. NERACA

Neraca mencerminkan situasi keuangan Kantor Kementerian Agama terkait dengan aset, utang, serta ekuitas pada tanggal 31 Desember.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan ini merangkum sumber daya ekonomi yang digunakan dan diperoleh selama periode pelaporan, mencakup pendapatan, beban, serta surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan non-operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas akan memperlihatkan setidaknya informasi berkenaan pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit laba rugi pada periode yang bersangkutan, serta perbaikan kesalahan pokok.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CALK memberikan penjelasan rinci dan analisis tentang setiap pos dalam laporan keuangan, serta mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Kementerian Agama RI, 2022).

2.4 Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten pada saat ini dipimpin oleh Bapak H. Anif Solikhin, S.Ag, M.Si beliau menjadi ketua di Kantor selama dua periode.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten mempunyai visi yaitu *“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”*.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten mempunyai misi yaitu:

- Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama.
- Memperkuat moderisasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan, dan
- Menetapkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

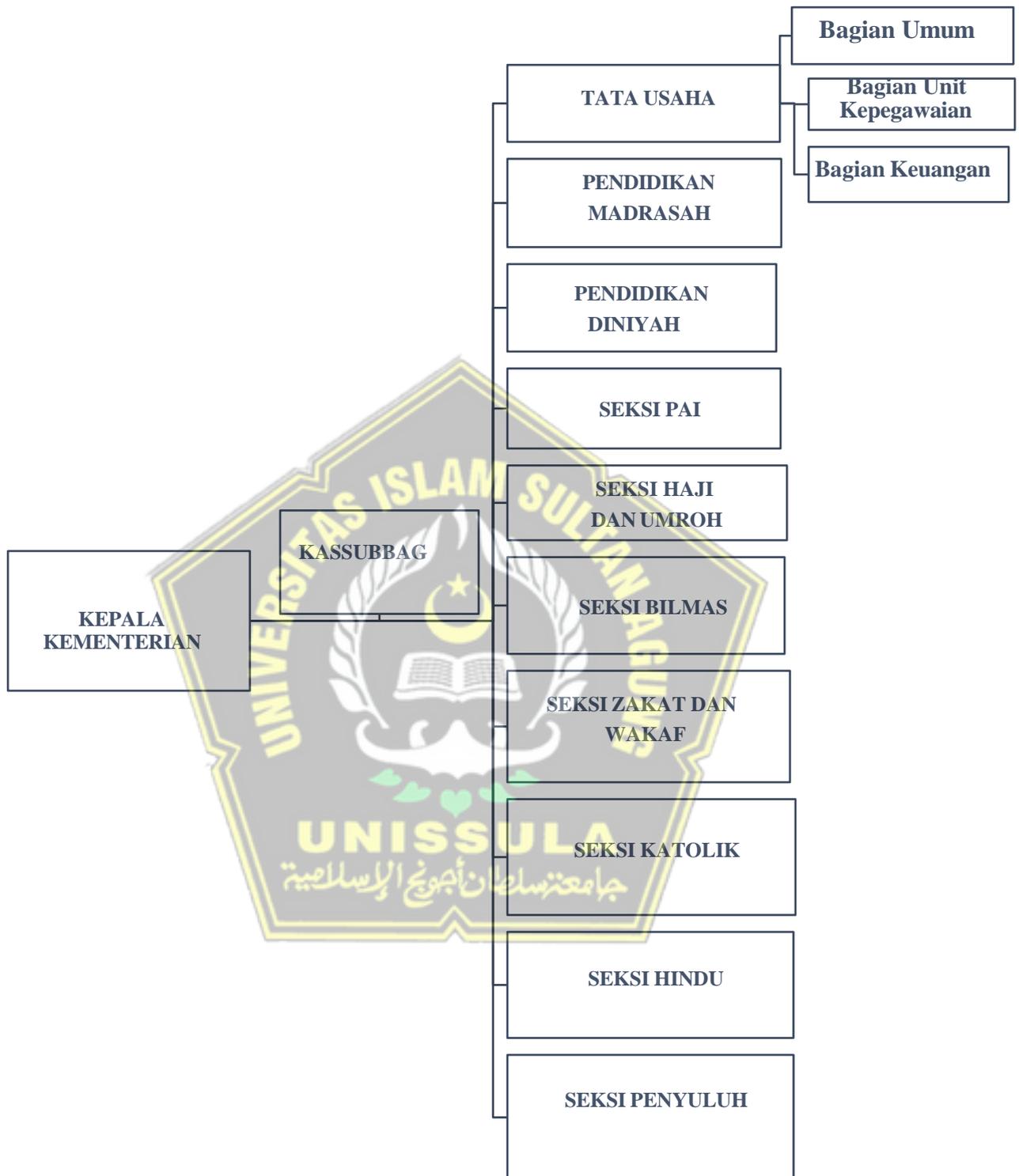
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten berkedudukan di jalan Ronggowarsito Klaten berada di bawah tanggung jawab kepada kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama. Kantor ini mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kementerian Agama dan ketentuan perpu dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- ❖ Subbagian Tata Usaha.
- ❖ Seksi Pendidikan Madrasah.
- ❖ Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- ❖ Seksi Pendidikan Agama Islam.
- ❖ Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- ❖ Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- ❖ Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf.
- ❖ Penyelenggaraan Katolik.
- ❖ Penyelenggaraan Hindu.

2.4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dipimpin oleh bapak kepala yang sudah dua periode mengemban jabatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kepala Kantor Kemenrian Agama Kabupaten Klaten membawahi beberapa bagian, berikut Susunan Organisasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Bagian-bagian dibawah Kepala Kementerian memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang telah ditetapkan:

1. Bagian Kassubbag, mengoordinasikan kebijakan teknis serta merencanakan administrasi, keuangan, dan aset negara di Kementerian Agama, sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2013.
2. Bidang Tata Usaha, bidang ini bertanggung jawab atas kebijakan teknis, administrasi, surat-menyurat, pegawai, aset negara, dan koordinasi keamanan serta hubungan masyarakat.
3. Posisi Seksi Pendidikan Madrasah, mengelola pelayanan, bimbingan teknis, serta data pendidikan untuk raudhatal athfal, madrasah ibtidaiyah, dan tsanawiyah.
4. Dalam Posisi Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, pelayanan dan bimbingan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, termasuk data dan perencanaan.
5. Pelaksana tugas Pendidikan Agama Islam, Bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan agama Islam di semua jenjang, mulai dari usia dini hingga sekolah menengah.
6. Dalam mengurus Haji dan Umrah, Melayani seluruh aspek terkait haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, pembatalan, bimbingan manasik, hingga administrasi keuangan.
7. Tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Menangani urusan agama dan keluarga harmonis serta penerangan agama Islam, termasuk pengelolaan data dan pelaporan.

8. Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, Mengelola pelayanan dan perencanaan terkait zakat dan wakaf, termasuk pengelolaan data dan pelaporan.
9. Penyelenggaraan Katolik, Menangani urusan agama Katolik, termasuk pelayanan, bimbingan teknis, dan perencanaan pendidikan agama Katolik.
10. Dalam kaitannya dengan urusan agama Hindu, Mengelola pelayanan, bimbingan teknis, serta perencanaan dan pelaporan dalam pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
11. Penyuluh Agama Penyuluh agama bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui ajaran agama yang mudah dipahami untuk mendukung pembangunan (Ilmu & Publik, 2020)

2.4.2 Penerapan Pengelolaan Keuangan berdasarkan pada Nilai *Prophetic* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Penetapan strategi pengelolaan keuangan mengacu pada nilai *prophetic* bertujuan untuk mencapai tujuan dan mematuhi ketentuan pemerintah. Dengan adanya nilai yang telah diatur, para Pegawai bagian keuangan akan merasa terbantu dalam menyusun laporan keuangan karena sudah terdapat pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pendanaan pemerintah berasal dari kontribusi masyarakat dan digunakan untuk kepentingan bersama, dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan penting untuk menjaga akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Setiap

pengeluaran harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat dampak jangka panjangnya. Akuntansi keuangan yang akurat dan terstruktur dengan baik memainkan peran yang sangat vital dalam manajemen keuangan, karena ia menjadi fondasi utama untuk menghasilkan informasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga tepat waktu dan dapat diandalkan, yang selanjutnya memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif dan mendalam, serta memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar guna menghindari potensi kesalahan di masa depan. Sebagaimana diungkapkan oleh Budiandru et al. (2023), sistem akuntansi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan, yang sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan negara mencakup serangkaian kegiatan yang terstruktur, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel, sebagai wujud komitmen negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam penggunaan anggaran negara, yang tentunya tidak hanya berfokus pada pencapaian target finansial, tetapi juga pada penciptaan dampak positif bagi masyarakat luas.

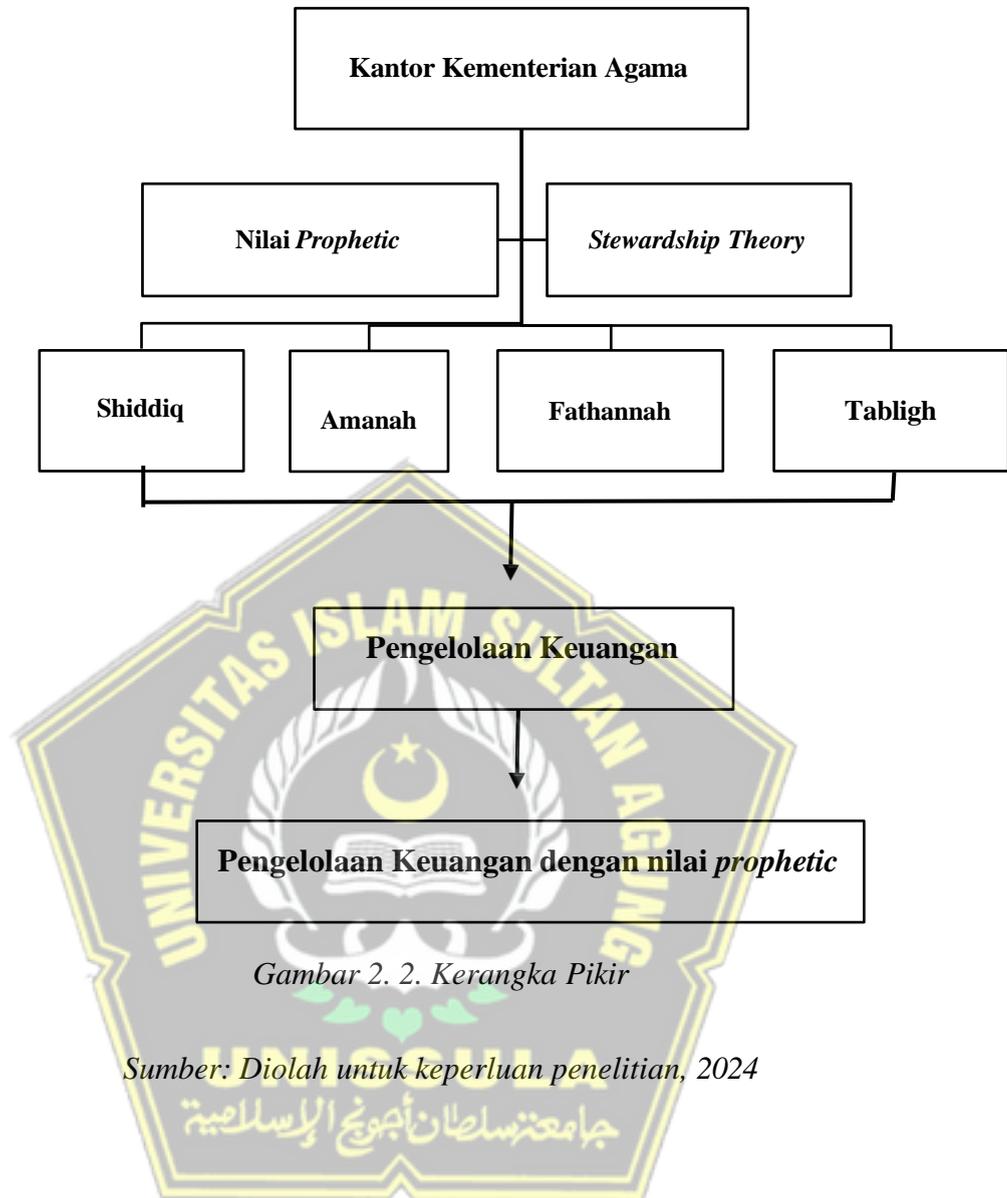
Prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses

desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam bingkai regulasi yang ketat dan diawasi oleh pemerintah pusat, untuk menjaga agar pengelolaan tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, setiap entitas pemerintah, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, terkontrol dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Dalam hal ini, Herindraningrum & Yuhertiana (2021) menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan cermin dari integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sehingga pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada angka dan laporan, tetapi juga pada dampak sosial yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Nilai-nilai seperti shiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh yang diterapkan dipengelolaan keuangan, seperti di Kantor kemegan Kabupaten Klaten, memperkuat integritas individu serta sistem pengendalian internal. Pengendalian yang baik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan kesalahan

pencatatan, sekaligus memastikan laporan keuangan yang selaras dengan regulasi. Dengan pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral yang membangun kepercayaan publik (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).





Gambar 2. 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah untuk keperluan penelitian, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Saat ini mengadopsi pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan kemudian menyusun penjelasan yang mendalam mengenai kondisi terkini yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai proses pengelolaan keuangan yang sedang berlangsung. Menurut Sugiyono (n.d.), penelitian deskriptif tidak hanya berfokus pada pengujian hipotesis semata, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan terkait dengan status suatu objek atau peristiwa yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip nilai prophetic, seperti shiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh, diintegrasikan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Tujuannya supaya mengungkap diterapkannya nilai-nilai prophetic seperti shiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh dipengelolaan keuangan di Kantor Kemenag Kabupaten Klaten, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan dan pedoman keuangan yang berlaku. Analisis ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang keberhasilan dan tantangan

dalam menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai upaya memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel di lingkup pemerintahan (Sugiyono, n.d.).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Studi diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Jl. Ronggowarsito, Klaten Utara, Jawa Tengah, dengan metode penelitian lapangan dan wawancara untuk menggali penerapan nilai prophetic dalam pengelolaan keuangan.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini menyoroti penerapan nilai propheticshiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh dalam laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi kualitas pelaporan keuangan sekaligus mengidentifikasi hambatan dan kelebihan dalam penerapannya, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik di tingkat daerah (Sugiyono, n.d.).

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala informasi yang mempunyai suatu keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis paka 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Nurjanah (2021) menyatakan data didapat dari sumbernya lewat wawancara mendalam dengan tiga pegawai bagian keuangan serta Kepala Kasubbag Kantor Kemenag Kabupaten Klaten yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai prophetic seperti shiddiq, amanah, fathannah, dan tabligh

diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di Kantor Kementerian Agama, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan valid mengenai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip etika dan transparansi tersebut.

2. Data Sekunder

Prawiyogi et al. (2021) menyebutkan bahwa data sekunder berasal dari sumber tidak langsung seperti dokumen, literatur, dan peraturan. Penelitian ini memanfaatkan regulasi, SOP, jurnal, dan buku terkait pengelolaan keuangan negara untuk memperkaya analisis, memberikan konteks luas, dan mendukung temuan wawancara dalam mengevaluasi penerapan nilai prophetic di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang komprehensif dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data yang saling melengkapi, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi sebagai sarana utama untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam. Observasi dilakukan dengan penuh ketelitian untuk mengamati fenomena atau kejadian yang terjadi secara real-time, memberi penulis wawasan yang lebih tajam tentang konteks dan dinamika yang sedang diteliti. Wawancara kemudian dilaksanakan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung, memberikan sudut pandang yang lebih beragam dan

memperkaya data yang diperoleh, sementara dokumentasi digunakan untuk menganalisis rekam jejak yang ada, baik berupa arsip, laporan, ataupun catatan yang terkait dengan topik penelitian, untuk mendukung validitas dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Pendekatan yang menggabungkan ketiga metode ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, tetapi juga memberikan dimensi yang lebih holistik dalam memahami fenomena yang sedang dikaji, mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Observasi

Menurut Yusra et al. (2021), teknik pengumpulan data lewat observasi dilibatkannya pengamatan langsung yang sistematis, pencatatan yang teliti, dan penelaahan terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek penelitian, serta pengidentifikasian indikator-indikator yang relevan dengan variabel yang sedang dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk menggali informasi secara langsung mengenai penerapan nilai prophetic dipengelolaan laporan keuangan di Kantor Kemenag Kabupaten Klaten. Proses observasi ini melibatkan pengamatan terhadap praktik kerja sehari-hari, interaksi antara pegawai, serta penerapan prinsip-prinsip integritas, amanah, dan transparansi yang tercermin dalam aktivitas pengelolaan keuangan tersebut. Penulis secara cermat mengamati bagaimana pengelola keuangan di kantor ini mengimplementasikan nilai-nilai prophetic yang diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta seberapa konsisten nilai-nilai tersebut diterapkan dalam keputusan-keputusan yang diambil, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pelaporan keuangan. Melalui observasi ini, penulis

berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan.

b. Wawancara

Menurut (Sari & Zefri, 2019) menjelaskan wawancara yakni sebuah metode pengumpulan data jika peneliti mau mengupayakan studi penelitian agar mengetahui hal-hal dari narasumber lebih dalam. Penulis melakukan wawancara secara face to face kepada 4 pegawai bagian tata usaha serta kepala kantor yang meliputi bagaimana penerapan nilai *prophetic* terhadap lapran keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. dan penjelasan mengenai hal tersebut nilai *prophetic* yang sudah ditetapkan pada kantor ada yang tidak dipatuhi dapat membuat pembuatan laporan keuangan tidak jujur atau Pegawai bisa memanipulasi laporan tersebut.

Pada Penelitian ini peneliti menanyakan ke informan terkait:

1. Wawancara dengan Bapak H. Anif Solikhin, S. Ag, M.Si (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten) terkait “Bagaimana Implementasi nilai prophetic dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?”.
2. Wawancara dengan Bapak Andi Wahyudi, S.E (Kepala Bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten) terkait “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Pada tahap pelaksanaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?”.
3. Wawancara dengan Ibu Aulia Noor Khofiana, S.E, M.Ak (Staff Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten) terkait “Bagaimana

pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?”.

4. Wawancara dengan Bapak Sri Widodo, A.Md (Staff Bagian Kepegawaian) terkait “Bagaimana penatausahaan pada laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?” serta “Aplikasi apa yang telah digunakan untuk menginput keuangan pada Kantor Kementerian Agama?” dan “Bagaimana proses pencairan anggarannya?”.
5. Wawancara dengan Bapak Gunarto, S.H (Kepala Bagian Tata Usaha) terkait “Apa Kendala dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten?”.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (n.d.), dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan catatan atau gambar yang mencerminkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, yang berfungsi sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, proses dokumentasi dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir, menggunakan teknologi modern seperti laptop dan handphone untuk mengumpulkan dokumen serta foto yang relevan. Tujuan utama dari pengumpulan dokumentasi supaya diperolehnya data yang akurat dan komprehensif mengenai penerapan nilai prophetic dipengelolaan laporan keuangan di Kantor Kemenag Kabupaten Klaten pada tahun 2024. Melalui teknik ini, penulis memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam bentuk soft file, seperti laporan keuangan, kebijakan internal, serta foto-foto yang menggambarkan proses pelaporan, dapat diakses dan dianalisis secara efisien untuk mendalami sejauh mana nilai-nilai prophetic termasuk integritas, amanah, dan transparansi telah diterapkan

dalam praktik keuangan di instansi tersebut. Dokumentasi yang diperoleh diharapkan menjadi sumber yang kuat dan valid untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Nafisatur (2024) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terstruktur dan sistematis untuk menyusun serta mengorganisir informasi sehingga mudah untuk dipahami, memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan nilai prophetic dalam laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, tanpa melakukan perbandingan antara berbagai variabel yang ada, melainkan lebih fokus pada pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan pola pengelolaan keuangan yang diterapkan. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang objektif, jujur, dan tidak bias, yang pada gilirannya dapat memberikan kesimpulan yang relevan dan bernilai untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan di instansi tersebut telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan yang bersih. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono (n.d.), pendekatan ini sangat efektif dalam menyajikan data yang sesuai dengan konteks tanpa adanya upaya untuk membandingkan atau menginterpretasikan variabel secara langsung, namun lebih pada pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap objek yang diteliti, sehingga menghasilkan temuan yang lebih autentik dan bermakna dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat daerah.

3.6 Informan Penelitian.

Peneliti secara cermat memilih informan yang terlibat langsung, guna memastikan data yang relevan, akurat, dan berbobot. Fokusnya adalah menggali perspektif mendalam tentang penerapan nilai prophetic dalam pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip dan regulasi. Berikut yang daftar informan yang terlibat dalam studi:

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	H. Anif Solikhin, S.Ag, M.Si	Kementerian Agama Kab. Klaten	Kepala Kantor
2.	Andi Wahyudi, S.E	Kementerian Agama Kab. Klaten	Kepala Bagian Keuangan
3.	Aulia Noor Khofiana, S.E, M.Ak	Kementerian Agama Kab. Klaten	Staff Keuangan
4.	Sri Widodo, A,Md	Kementerian Agama Kab. Klaten	Staff Kepegawaian
5.	Gunarto, S.H	Kementerian Agama Kab. Klaten	Kepala Bagian Tata Usaha

Gambar 3. 1. Informan yang terlibat dalam penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Manajemen keuangan merupakan salah satu pilar fundamental yang menopang stabilitas dan keberlanjutan operasional sebuah institusi, mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan yang terorganisir, pencatatan yang cermat, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, meskipun tidak memiliki target pendapatan negara yang spesifik, pengelolaan keuangan tetap dilaksanakan dengan penuh disiplin dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi acuan utama. Proses pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara sistematis dan terintegrasi di setiap tahapan, mulai dari penyusunan anggaran hingga evaluasi penggunaan dana, dengan tujuan untuk menjaga agar seluruh anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien, sesuai dengan prioritas, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Dalam hal ini, setiap tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan di kantor tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menekankan nilai efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek penggunaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa dana publik dikelola dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan kemaslahatan masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan dana yang berfokus pada

program prioritas masyarakat dan tujuan lembaga, tanpa mengabaikan prinsip good governance. Dengan pengelola yang terlatih dan nilai prophetic sebagai landasan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten memastikan setiap keputusan keuangan selaras dengan integritas dan tanggung jawab publik.

1. Perencanaan

Pengelolaan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan sangat memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan masing-masing bagian perencanaan, Tata Usaha, dan Subbagian Keuangan. Proses pengelolaan anggaran ini dimulai dengan kolaborasi erat antara bagian perencanaan yang bertanggung jawab dalam merancang rencana kerja yang komprehensif, program-program yang terstruktur, serta anggaran yang disusun dengan detail untuk memastikan keselarasan antara apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Pada tahap berikutnya, evaluasi dan pelaporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memantau apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan rencana awal, sekaligus memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan pengelolaan keuangan dan untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan anggaran berlangsung dengan lancar dan mengarah pada keberhasilan yang diinginkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten mengadakan rapat kerja anggaran yang secara rutin diadakan untuk memenuhi kebutuhan operasional internal. Rapat ini melibatkan perwakilan dari setiap bagian terkait, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap bagian dapat

memberikan kontribusi dalam merumuskan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan anggaran yang akan disusun. Hasil dari rapat kerja tersebut kemudian diajukan ke kantor wilayah dan pemerintah pusat sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh instansi terkait. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua pegawai dapat hadir dalam rapat tersebut, yang berpotensi mengurangi tingkat komunikasi dan pemahaman bersama tentang isu-isu anggaran yang dibahas.

Bagian perencanaan dalam pengelolaan keuangan memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab besar dalam merancang dan menyusun dasar dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, perencanaan bukan sekadar proses administratif semata, tetapi lebih merupakan langkah strategis yang melibatkan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif dari berbagai divisi terkait untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap pelaksanaan program sebelumnya, guna mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut berjalan sesuai harapan dan bagaimana anggaran yang dialokasikan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Tidak hanya berfokus pada penyusunan anggaran semata, perencanaan juga mencakup evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap program yang telah dilaksanakan sebelumnya, untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana yang ditujukan untuk masing-masing program atau kegiatan memang sudah sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan, serta memperhitungkan kemungkinan adanya kebutuhan tambahan anggaran pada program yang mengalami kekurangan, demi memastikan

pencapaian tujuan yang lebih optimal.

Lebih dari itu, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, setiap langkah yang diambil dirancang dengan tujuan yang sangat jelas dan terarah, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam hal ini, proses perencanaan tidak hanya sebatas menjadi fondasi awal bagi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur bagi keberhasilan pencapaian tujuan jangka panjang. Setiap alokasi anggaran yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang terasa secara bertahap, sehingga hasil dari setiap program yang dijalankan akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan pengembangan program-program tersebut dalam jangka panjang. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efisien, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana, demi memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mewujudkan tujuan yang lebih besar.

2. Pelaksanaan

Koordinasi antarpegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menjadi kunci utama dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan efisien. Melalui harmonisasi kerja setiap subbagian, anggaran dapat dikelola. Proses evaluasi berkala dan penetapan penanggung jawab berbasis kontrak kerja memberikan kepastian bahwa program yang dilaksanakan terukur, akuntabel, dan sesuai target yang ditetapkan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berperan dokumen acuan utama dipencairan anggaran, mendukung operasional program dengan transparansi yang tinggi. Dukungan administrasi seperti formulir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) memastikan pengeluaran perjalanan dinas dan kebutuhan operasional lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara efisien. Dengan sistem ini, penggunaan dana menjadi lebih terstruktur dan selaras dengan prinsip keuangan negara yang akuntabel.

3. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten bergantung pada koordinasi erat antarbagian, dengan Tata Usaha memastikan administrasi keuangan berjalan lancar dan Bendahara menjaga transparansi serta akuntabilitas transaksi. Setiap transaksi dan pengeluaran dipantau ketat untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan dana, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan.

SIMAK BMN dan pencairan anggaran berbasis digital didukungnya pengelolaan aset negara lebih efisien serta terstruktur. Penerapan transaksi non-tunai dan penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk

proyek KUA memastikan setiap aliran dana tercatat dengan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, memperkuat akuntabilitas dan integritas pengelolaan anggaran di instansi ini.

4. Pelaporan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan cermat memanfaatkan teknologi terkini, seperti Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan aplikasi SAKTI, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun tidak hanya akurat, tetapi juga transparan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini, pendapatan dan beban diakui tidak hanya saat uang diterima atau dibayarkan, melainkan saat transaksi tersebut benar-benar terjadi, yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan nyata mengenai posisi keuangan negara pada suatu periode tertentu. Pendekatan ini memungkinkan setiap kegiatan dan transaksi keuangan tercatat dengan lebih tepat waktu dan relevan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan yang sering kali terjadi dalam sistem akuntansi berbasis kas. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik dan pihak berwenang. Dengan demikian, penggunaan teknologi seperti SAIBA dan SAKTI tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pengelolaan anggaran negara di tingkat daerah.

Operator SAIBA di Kantor Kementerian Agama berperan penting dalam memastikan kelancaran dan akurasi pengelolaan keuangan, dengan pelatihan dan pemahaman mendalam terhadap sistem ini. Dukungan teknologi dan SDM yang kompeten memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang efisien, meningkatkan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

5. **Pertanggungjawaban**
Berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara rinci dan mendalam, tingkat capaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Laporan ini tidak hanya mencakup evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga mencerminkan transparansi dan komitmen instansi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan setiap indikator kinerja yang relevan. Setiap capaian yang tercatat dalam laporan tersebut menggambarkan upaya nyata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun dalam pencapaian target-target strategis yang telah direncanakan. Proses pelaporan ini menjadi penting, karena selain sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan, laporan tersebut juga berfungsi sebagai cermin bagi instansi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data yang valid, capaian yang tercatat tidak hanya

menambah kredibilitas lembaga tersebut, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang dedikasi dan upaya maksimal yang telah dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten secara keseluruhan..

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Masing-Masing Program

No.	Program	Capaian Per Program
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	90%
2.	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	95%
3.	Program Pendidikan Islam	92%
4.	Program Bimbingan Masyarakat Islam	90%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten 2024

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengukur sejauh mana visi yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, serta untuk menilai dampak yang dihasilkan dari setiap upaya yang dilakukan dalam proses implementasi berbagai program dan kebijakan. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap setiap langkah dan tindakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan besar yang telah digariskan, mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimaksimalkan, sekaligus mengungkap area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan lebih lanjut. Dalam konteks ini, analisis pencapaian kinerja bukan hanya sebuah langkah reflektif semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk

memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada digunakan secara optimal dan bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa mengarah pada pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan. Dengan cara ini, analisis pencapaian kinerja menjadi tolok ukur yang tak terpisahkan dari proses perencanaan dan evaluasi berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menciptakan sebuah siklus positif yang mendorong perbaikan yang terus-menerus, sehingga visi yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi sebuah harapan, tetapi juga sebuah kenyataan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak yang terlibat.

6. Pengawasan

Pengawasan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten berperan sebagai penjaga kualitas, memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara tepat. Pengawasan yang efektif membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keuangan, memungkinkan perbaikan cepat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Meski dihadapkan pada kendala seperti keterlambatan dana, kekurangan anggaran, dan terbatasnya SDM, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten terus berinovasi dengan efisiensi pengelolaan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperbaiki koordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini diharapkan memperlancar proses keuangan dan memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4.2 Implementasi Nilai *Prophetic* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten

Sejak masa kanak-kanak, telah dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya, membentuk pola pikir dan cara pandangnya terhadap kehidupan yang

berlangsung terus menerus hingga dewasa. Dalam konteks Islam, pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kebaikan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keberkahan di dunia, melainkan juga untuk meraih pahala yang kelak akan menuntun seseorang menuju surga, sementara keburukan yang dilakukan dalam hidup ini dipandang sebagai jalan menuju siksaan di neraka. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup yang diyakini oleh setiap muslim, dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dua sumber ajaran utama yang selalu dijadikan rujukan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Rasulullah saw. sebagai suri tauladan yang sempurna, menunjukkan melalui kehidupannya bagaimana nilai-nilai kehidupan yang ideal harus diterapkan oleh umatnya, yang terwujud dalam empat sifat Prophetic yang mulia: Shiddiq (kejujuran), Amanah (kepercayaan), Fathanah (kebijaksanaan), dan Tabligh (menyampaikan kebenaran). Nilai-nilai ini tidak hanya sekadar ajaran moralitas, tetapi menjadi kerangka yang mengarahkan umat Islam untuk bertindak benar di aspek kehidupan mereka, dengan selalu mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten memiliki peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Prophetic di kalangan pegawainya. Nilai-nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek ibadah ritual seperti sholat, puasa, serta baca Al-Qur'an, yang menjadi simbol ekspresi paham keagamaan para pengelola keuangan. Para pegawai di kantor tersebut sudah menyadari pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka dan berusaha menjalankannya dengan semangat ibadah yang tinggi.

Meskipun begitu, program khusus peningkatan individu di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Klaten belum terorganisir dengan baik. Peningkatan integritas dalam lingkungan kantor masih perlu perhatian lebih, meskipun pemahaman terhadap nilai Prophetic sudah diterima dan mulai mempengaruhi sikap para pegawai. Nilai-nilai hidup yang diwariskan oleh Rasulullah saw, seperti Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh, seharusnya diterapkan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan dan pengendalian diri bagi setiap muslim.

1. Shiddiq

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, penerapan nilai Shiddiq, yang mengacu pada kejujuran dan integritas, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan di lingkungan kantor tersebut. Kepala Kantor secara aktif mengarahkan para pegawai agar senantiasa memiliki integritas yang tinggi dalam setiap tindakan mereka, terlebih dalam hal keuangan yang memerlukan transparansi dan tanggung jawab penuh. Nilai kejujuran ini tidak hanya berlaku dalam interaksi formal di tempat kerja, tetapi juga ditekankan dalam hubungan mereka dengan diri sendiri, keluarga, serta masyarakat sekitar. Dalam pandangannya, kejujuran adalah landasan utama yang membentuk karakter profesional seorang pegawai, yang tidak hanya mengutamakan kebenaran dalam pelaporan, tetapi juga dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Untuk memperkuat penerapan nilai Shiddiq di kantor tersebut, Kepala Kantor rutin mengingatkan para pegawai akan pentingnya menjaga integritas mereka melalui berbagai kesempatan. Salah satunya adalah

dengan mengadakan apel rutin setiap minggu yang menjadi momen refleksi bagi seluruh pegawai untuk mengevaluasi sikap dan perilaku mereka selama seminggu bekerja. Dalam apel ini, para pegawai diberikan arahan dan pengingat tentang pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam tugas kedinasan maupun dalam hubungan pribadi. Kepala Kantor secara khusus menekankan untuk menghindari segala bentuk kebohongan, sekecil apapun, demi menjaga nama baik diri sendiri, serta nama baik kantor, yang diamanahkan untuk mengelola keuangan negara dengan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui pengingat- pengingat tersebut, Kepala Kantor berharap bahwa para pegawai tidak hanya sekadar memahami pentingnya nilai Shiddiq dalam teori, tetapi mampu mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari mereka, baik dalam konteks pengelolaan keuangan maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat dan rekan kerja. Dengan cara ini, nilai Shiddiq diharapkan menjadi pilar yang kokoh dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang transparan, jujur, dan penuh tanggung jawab.

2. Amanah

Amanah, sebagai nilai yang menekankan pentingnya sikap tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, menjadi fondasi utama dalam operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Nilai ini mencerminkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, yang memiliki peran vital dalam menjaga dan mengelola sumber daya negara dengan sebaik-baiknya. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, amanah bukan hanya sekadar menjadi pedoman dalam menjalankan

tugas sehari-hari, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat. Setiap pegawai diharuskan untuk bertanggung jawab atas segala proses keuangan, tanpa adanya penyimpangan atau ketidaktransparanan yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam pandangan ini, amanah bukan hanya sekadar nilai abstrak, tetapi harus terwujud dalam tindakan nyata yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan secara keseluruhan.

Proses keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap dana yang dikeloladigunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran harus mengutamakan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan internal organisasi maupun kepada masyarakat. Hal ini berfungsi untuk menjaga agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara, sehingga pemerintah dapat terus menerus menjalankan fungsinya tanpa hambatan, sekaligus membuktikan bahwa tugas yang diemban benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Nilai Amanah yang diterapkan dengan sepenuh hati di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam setiap kebijakan dan tindakan pegawai, menciptakan suatu budaya kerja yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme di semua lini. Amanah ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga merembes dalam interaksi sehari-hari antar sesama pegawai dan dengan masyarakat, sehingga menciptakan iklim kerja yang saling menghargai dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran serta

transparansi. Nilai yang dijunjung tinggi ini berakar pada teladan yang diberikan oleh Rasulullah saw, yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini mendorong setiap pegawai untuk senantiasa bekerja dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah yang diambil, baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun dalam pelayanan publik, harus dilandasi oleh niat yang tulus dan integritas yang tak tergoyahkan, agar tujuan yang dicapai benar-benar mencerminkan harapan masyarakat dan negara.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, nilai Amanah ini menjelma menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem yang tidak hanya akuntabel dan efisien, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap pegawai, dengan menjunjung tinggi amanah, bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya publik dengan cara yang transparan dan tepat sasaran, memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dengan demikian, melalui penerapan nilai Amanah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tidak hanya menunjukkan kinerja yang baik dalam hal efisiensi dan efektivitas, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini, yang terbangun dari konsistensi dalam menjaga amanah, menjadi landasan penting bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan citra positif lembaga pemerintahan di mata publik.

3. Fathanah

Fathanah, sebagai salah satu sifat Rasulullah saw yang mencerminkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kepala Kantor dengan bijaksana menekankan bahwa kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teknis tentang keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola perasaan dan menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia pengelolaan anggaran yang penuh dengan tantangan, Fathanah menjadi fondasi utama untuk mengembangkan inovasi yang tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga menjawab kebutuhan yang terus berkembang. Pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, yang tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan etika, membutuhkan kecerdasan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, namun tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kecerdasan ini juga mendorong setiap individu untuk berpikir kritis dan kreatif, mencari solusi yang inovatif meskipun dalam keterbatasan yang ada. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kerap kali muncul, seperti kekurangan anggaran yang tidak terduga, sifat Fathanah yang bijaksana menjadi kunci utama dalam membantu para pengelola keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk berpikir lebih mendalam dan keluar dari jebakan permasalahan yang tampaknya sulit dipecahkan. Fathanah tidak hanya mendorong pengelola keuangan untuk merespons

setiap tantangan dengan solusi yang tepat dan akurat, tetapi juga menuntut mereka untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Kecerdasan emosional yang dimiliki oleh para pengelola ini memungkinkan mereka untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi tekanan, sedangkan kecerdasan intelektual mereka mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan kritis, merumuskan langkah-langkah preventif yang dapat memitigasi dampak dari masalah anggaran yang terjadi. Keberanian untuk bertindak dengan cara yang proaktif dan solutif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang berlaku, menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam upaya menjaga kestabilan pengelolaan keuangan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi tersebut.

Salah satu solusi inovatif yang diterapkan untuk menghadapi kendala anggaran adalah dengan menjalin kemitraan strategis dengan bank-bank, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, dalam rangka mendukung pencairan dana yang lebih lancar dan memastikan kelancaran proses pengelolaan keuangan. Kemitraan ini bukan sekadar bentuk kerjasama, melainkan sebuah manifestasi dari kecerdasan dalam melihat peluang dan keberanian untuk beradaptasi dengan dinamika dunia keuangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dapat mengelola anggaran secara lebih fleksibel dan efisien, memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan dengan tepat sasaran dan tanpa penundaan yang berarti. Keberhasilan pengelolaan

keuangan ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan administratif semata, tetapi juga memerlukan kecerdasan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan cara yang inovatif dan terintegrasi, demi mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif bagi keberlanjutan program-program kementerian.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang tak terhindarkan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi kelancaran operasional serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang terkadang belum optimal, sifat Fathanah yang dimiliki oleh para pengelola keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tetap menjadi pijakan yang kokoh dan tak tergoyahkan dalam menghadapi semua hambatan tersebut. Fathanah, sebagai sebuah nilai yang mengedepankan kebijaksanaan, mengajarkan bahwa pengelolaan yang sukses bukan sekadar tentang menyelesaikan masalah yang tampak di hadapan, tetapi lebih jauh dari itu, merupakan suatu perjalanan menuju perbaikan berkelanjutan dengan mengambil langkah-langkah yang visioner dan transformatif. Prinsip bijaksana yang tercermin dalam nilai ini memandu para pengelola keuangan untuk tidak hanya merespons situasi dengan solusi sementara, melainkan untuk terus menggali dan merumuskan solusi yang lebih baik dan lebih efektif untuk masa depan. Melalui penerapan prinsip Fathanah ini, para pengelola tidak hanya diharuskan untuk bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi masalah, tetapi juga untuk selalu menyiapkan diri dalam merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah inovatif yang lebih jauh guna mengatasi keterbatasan yang

ada, sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan penyelesaian jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih baik di masa depan.

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan kombinasi kecerdasan intelektual untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, kecerdasan emosional untuk menjaga hubungan baik antar pegawai dan pihak terkait, serta kecerdasan spiritual untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implementasi sifat Fathanah dalam pengelolaan keuangan di kantor ini tidak hanya membantu dalam mengatasi tantangan, tetapi juga membentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih baik dan lebih adil di masa depan.

4. Tabligh

Tabligh, yang dalam konteks ajaran Islam berarti komunikasi yang transparan dan argumentatif, diimplementasikan dengan sangat efektif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan jelas antara pimpinan dan pegawai. Penerapan nilai ini terlihat jelas dalam rapat bulanan yang rutin dilaksanakan, di mana semua pihak dapat berpartisipasi aktif untuk membahas berbagai masalah terkait anggaran dan keuangan. Rapat tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan informasi secara langsung, dengan komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah, melainkan dua arah, yang memungkinkan adanya dialog terbuka mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Komunikasi yang demikian menciptakan sebuah budaya kerja

yang mendorong pegawai untuk lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan pendapat, serta memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk memberikan arahan yang lebih jelas, sehingga tercapai pemahaman bersama yang mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi.

Pendekatan pertama, komunikasi lisan, dilakukan melalui percakapan langsung dalam rapat-rapat rutin, yang memungkinkan pegawai dan pimpinan untuk saling bertukar informasi, berbagi pemikiran, serta menyampaikan klarifikasi mengenai kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pendekatan kedua, *Bi al-af'al/al-amal*, lebih menekankan pada tindakan nyata yang harus diambil untuk memastikan bahwa apa yang telah dibicarakan dalam komunikasi lisan dapat terwujud dalam praktik pengelolaan keuangan yang benar, akuntabel, dan efisien. Tindakan nyata ini mencakup upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang muncul, seperti kekurangan anggaran, dengan cara yang konkret.

Selain itu, pendekatan ketiga, *Bi al-kitabah*, menekankan pentingnya penyampaian informasi secara tertulis yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, yang menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi nilai *Tabligh* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Penyampaian informasi secara tertulis ini diwadahi melalui laporan-laporan keuangan yang disusun dengan sangat rinci dan teliti, mencakup setiap detail transaksi dan alur pengelolaan dana, yang kemudian disebarakan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan agar setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dapat memahami secara mendalam kondisi keuangan yang sebenarnya dan kebijakan apa saja yang diterapkan untuk mendukung pengelolaan tersebut. Tidak hanya itu,

laporan-laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pemahaman yang seragam di seluruh jajaran terkait, sehingga tidak ada ruang untuk salah paham atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan pendekatan ini, komunikasi yang terjalin tidak hanya sebatas sebagai proses berbagi informasi, tetapi lebih dari itu, juga mencakup upaya yang lebih luas untuk membangun integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan keuangan. Hal ini pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana setiap keputusan yang diambil, baik secara administratif maupun strategis, dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik dan memastikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini—Fathanah, Tabligh, dan Bi al-kitabah—pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tidak hanya fokus pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada penciptaan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi dalam setiap aspek operasional. Hal ini memungkinkan terciptanya kepercayaan antara pimpinan dan pegawai, serta antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan masyarakat luas, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tindakan yang diambil oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya, dengan tujuan utama untuk

meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta memulihkan citra baik Kementerian Agama di mata masyarakat. Integritas mengajarkan pegawai untuk selalu jujur dan menjaga komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan, sementara profesionalitas memotivasi mereka untuk bekerja dengan standar tertinggi, dengan keterampilan dan pengetahuan yang terus diperbarui. Inovasi menuntut kreativitas dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern, Tanggungjawab mengingatkan pentingnya kesadaran dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan, dan Keteladanan mengharuskan pegawai menjadi contoh yang baik dalam setiap perilaku dan keputusan yang diambil. Dengan penerapan nilai-nilai ini, Kementerian Agama bertujuan untuk membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat, yang akan berdampak pada efektifitas dan kepercayaan terhadap institusi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja tersebut, sangat penting untuk memastikan bahwa dukungan yang datang dari keikhlasan para pegawai menjadi landasan utama. Semboyan Kementerian Agama, “Ikhlas Beramal,” tidak hanya menjadi sebuah moto, tetapi merupakan pengingat yang kuat bagi setiap individu di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja dengan hati yang tulus dan penuh dedikasi, tanpa mengharapkan imbalan selain dari nilai amal yang diterima di sisi Allah. Keikhlasan inilah yang menjadi faktor penguat dalam memperbaiki citra. Keikhlasan ini tidak hanya tercermin dalam cara pegawai melayani masyarakat, tetapi juga dalam cara mereka bekerja secara internal untuk mendukung tujuan-tujuan strategis Kementerian Agama. Dengan keikhlasan tersebut, kinerja yang optimal akan tercapai, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai

institusi yang amanah dan berdedikasi dalam melayani umat.

4.3 Mapping/Matriks Hasil Penelitian

Tabel 4. 2. Matriks Hasil Penelitian

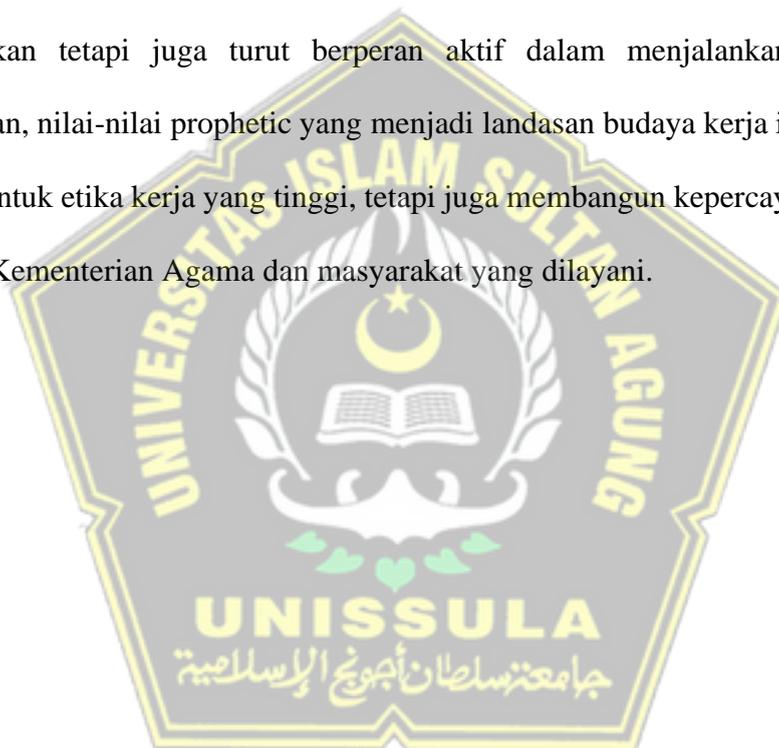
Nilai Prophetic	Implementasi pada pengelolaan keuangan	5 Budaya kerja kemenag RI
Shiddiq	On the track (Penyusunan dan Penggunaan Sistem Informasi Keuanagn yang terintegrasi)	Integritas
Amanah	Bekerja sesuai Tupoksi & Menjaga Kepercayaan	Tanggungjawab
Fathanah	Cerdas, Kreatif, & Bijaksana	Inovasi
Tabligh	Transparansi & Komunikatif	Profesionalis Keteladanan

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, penerapan nilai-nilai prophetic yang terdiri dari Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh dapat dijumpai dengan sangat jelas, berperan sebagai landasan fundamental yang membimbing setiap langkah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, yang tercermin melalui Lima Budaya Kerja yang menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pegawai. Nilai Shiddiq, yang memancarkan integritas dan kejujuran, menjadi pijakan yang kokoh dalam seluruh rangkaian pengelolaan keuangan, yang dilaksanakan dengan penuh ketelitian, transparansi, dan kepatuhan terhadap perencanaan yang telah disusun dengan seksama. Setiap langkah pengelolaan

anggaran, mulai dari perencanaan, alokasi dana, hingga pengawasan, dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip kejujuran, yang pada gilirannya menjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi ini. Kejujuran yang tercermin dalam pengelolaan anggaran ini bukan hanya sebatas untuk mencapai tujuan administratif atau kebijakan, tetapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan begitu, pengelolaan keuangan yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten bukan hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang berintegritas, yang selaras dengan harapan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang profesional dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya menjadikan instansi ini lebih dari sekadar penyelenggara administrasi, melainkan sebagai penjaga amanah yang diembannya. Sementara itu, nilai Amanah, yang mengedepankan rasa tanggung jawab dan kepercayaan, terlihat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menjaga integritas mereka dsetiap tanggung jawab yang diberikan, dengan komitmen untuk tidak mengecewakan harapan masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan anggaran negara kepada mereka.

Nilai Fathanah yang mengutamakan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sangat terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan yang ada, tetapi juga kreatif dalam mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, terutama dalam hal pengelolaan

keuangan yang memerlukan inovasi dan pemikiran yang cermat. Terakhir, nilai Tabligh yang mencakup komunikasi yang terbuka, transparan, dan argumentatif, diimplementasikan dengan sangat baik melalui transparansi dalam penyampaian informasi anggaran, serta komunikasi yang efektif antar bagian di lingkungan kantor. Setiap keputusan dan perkembangan terkait anggaran dan kebijakan selalu disampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait melalui rapat rutin, memastikan bahwa seluruh pegawai tidak hanya memahami kebijakan yang diterapkan tetapi juga turut berperan aktif dalam menjalankannya. Dengan demikian, nilai-nilai prophetic yang menjadi landasan budaya kerja ini tidak hanya membentuk etika kerja yang tinggi, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat antara Kementerian Agama dan masyarakat yang dilayani.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, menunjukkan bahwa kantor ini telah berupaya keras untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, ada tantangan yang perlu dihadapi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan para pegawai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban. Banyak pegawai yang meskipun memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, belum sepenuhnya terlatih untuk memenuhi tuntutan dan kompleksitas pekerjaan yang dihadapi. Namun, upaya untuk mengatasi hal ini tetap dilakukan melalui program pelatihan yang diberikan secara berkala, di mana setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan tuntutan tugas yang ada. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan dan pengetahuan, komitmen dan niat untuk terus berkembang tetap menjadi pendorong utama bagi para pegawai dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Proses peningkatan SDM yang terus menerus ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian tersebut,

sehingga pengelolaan keuangan di masa mendatang dapat semakin efektif dan efisien.

2. implementasi nilai prophetic di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, peneliti menemukan bahwa pegawai secara konsisten menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu manifestasi nyata dari penerapan nilai prophetic adalah kebiasaan tadarus Al-Qur'an dan shalat dhuha yang dilakukan oleh para pegawai sebelum memulai aktivitas kerja mereka. Kebiasaan ini tidak hanya menunjukkan kedekatan mereka dengan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan oleh Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen spiritual mereka dalam menjalankan tugas-tugas profesional. Nilai prophetic yang mencakup sifat Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh, telah terintegrasi dengan baik dalam kehidupan kerja mereka, yang tercermin dalam sikap integritas, tanggung jawab, kecerdasan dalam mengambil keputusan, dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Selain itu, lingkungan sekitar juga memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer kerja yang harmonis, di mana fenomena keagamaan dan sosial berjalan seiring sejalan, saling mendukung dan memperkuat. Dalam konteks ini, kinerja pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor administratif dan teknis semata, tetapi juga oleh kekuatan nilai-nilai spiritual yang mendalam yang mereka terapkan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Hal ini membuktikan bahwa implementasi nilai-nilai prophetic tidak hanya memberikan

dampak positif pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas, menciptakan lingkungan kerja yang berbasis pada integritas dan keberkahan.

5.2 Keterbatasan

Selama proses mengamati saat magang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, penulis mendapati beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penulis tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Karena keterbatasan wewenang dikarenakan penulis sebagai magang bukan pegawai.
2. Penulis belum bisa mengumpulkan data secara maksimal untuk penelitian ini karena bagi penulis untuk mendapatkan secara rinci membutuhkan waktu yang berjangka Panjang.

5.3 Saran

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dengan nilai *prophetic* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, terdapat beberapa hal yang diharapkan.

1. Dalam konteks pengelolaan keuangan yang berbasis pada nilai *prophetic* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, pemilihan pegawai yang tepat untuk mengisi jabatan-jabatan strategis harus didasari pada kualifikasi pendidikan dan kemampuan yang relevan. Hal ini sangat penting untuk

memastikan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan efisien. Jika pegawai yang ditempatkan dalam jabatan tertentu tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, maka bukan hanya akan menghambat kinerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran, yang tentu saja dapat merugikan organisasi dan masyarakat yang dilayani. Dengan memilih pegawai yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang memadai, diharapkan dapat tercipta proses pengelolaan keuangan yang lebih akurat, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga akan memperkecil risiko kesalahan administratif atau keuangan yang sering kali terjadi ketika pemilihan sumber daya manusia tidak didasarkan pada kemampuan yang mumpuni.

2. Di sisi lain, penting bagi setiap pengelola keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk tidak hanya memiliki pengetahuan teknis terkait manajemen keuangan, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman serta pengalaman mereka dalam bidang agama, khususnya mengenai nilai-nilai prophetic yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Hal ini tidak hanya akan memastikan keuangan dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, tetapi juga akan menciptakan harmoni antara ibadah dan tugas profesional. Ibadah yang merupakan hablun minallah (hubungan dengan Allah) harus senantiasa sejalan dengan pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan hablun minannas (hubungan dengan manusia),

karena keduanya memiliki dimensi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagai manusia, kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan kita hanyalah derajat ketakwaan kita. Oleh karena itu, setiap pengelola keuangan perlu menginternalisasikan nilai-nilai ketakwaan ini dalam setiap keputusan yang mereka ambil, baik dalam konteks ibadah maupun dalam mengelola keuangan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2021). AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>
- Arifuddin, A. (2019). Konsep Pendidikan Profetik (Melacak Visi Kenabian Dalam Pendidikan). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 319. <https://doi.org/10.22373/jm.v9i2.4782>
- Budiandru, B., Karsam, K., & Zakkiandri, Z. (2023). Pengelolaan Keuangan. *Owner*, 7(4), 3317–3326. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1726>
- fathanah.pdf.crdownload*. (n.d.).
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Ilmu, J., & Publik, A. (2020). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1 Januari 2020*. 9(1), 42–46.
- kemenag. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Kementerian Agama RI. (2022). *LKKA Audited Kementerian Agama Tahun 2022*. https://ppid.kemenag.go.id/v5/files/LKKA_2022_AUDITED_FULL_compressed.pdf
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183–199. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>
- Maulana, N. I. (2024). The Principles Of Prophet's Leadership In Organizational Management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(1), 24–29. <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/view/187>
- Muhammad Abdurrauf Nasrullah, & Khusnul Khotimah. (2023). Paradigma Tabligh Dalam Dakwah. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(1), 199–209. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i1.674>
- Musyirifin, Z. (2020). Musyirifin, Z. (2020). Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah

dalam *Konseling Behavioral*. *Al - Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(2), 151–159. Retrieved from <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/article/view/2088> Implementasi Sifa. *Al - Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(2), 151–159. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/article/view/2088>

Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.

Nurjanah. (2021). Data Primer. *Jurnal Mahasiswa*, 1, h. 5.

Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Data Sekunder. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>

Rodríguez, Velastequí, M. (2019). *Stewardship*. 2003, 1–23.

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Wawancara. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.

Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian*, (2022).

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Data Observasi. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>

